**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG PERANAN MNC PT FREEPORT TERHADAP PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI TIMIKA**

1. **Gambaran umum Kebijakan PT Freeport dalam Pembangunan SDM Di Papua.**

 Pengertian sumber daya manusia dan penerapannya sering kali masih belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam mengelola SDM menjadi faktor utama kesuksesan jalannya organisasi. Sumber daya manusia menurut Amstrong Manajemen sumber daya manusia adalah harta paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua, keberhasilan ini mungkin dicapai jika peraturan atau kebijkasanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut bertalian berhubungan, dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis. Ketiga Kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Serta yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi yakni semua anggota organisasi tersebut terlibat dan untuk mencapai tujuan bersama.[[1]](#footnote-1)

Pemerintah Orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto segera membuka kembali hubungan dengan dunia barat, dan terbukalah kembali kesempatan bagi Freeport untuk menggarap Gunung Bijih yang sekarang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Salah satu kebijakasanaan penting yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru Soeharto adalah penanaman modal swasta asing dan domestik sebagai unsur pembangunan nasional, melalui Undang-Undang Pokok Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Undang-Undang Pokok Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berikutnya.

Penanaman modal asing yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika sebagai negara industry yang mempunyai kekuatan superpower dalam sudut pandang *Imperialisme dan Kapitalisme* mempunyai 3 teori sebagai berikut:

Ketiga kelompok teori ini dirumuskan sebagai kelompok-kelompok teori **Gospel** (Tuhan,yang melambangkan keinginan manusia untuk menyebarkan agama untuk menciptakan dunia yang lebih baik), teori **Glory** (kebebasan yang melambangkan kehausan manusia dan kekuasaan), dan teori **Gold** (emas yang melambangkan keserahkahan manusia terhadap harta).[[2]](#footnote-2)

Dalam hal ini negara Republik Indonesia yang dikenal dengan pluralis dan demokrasi juga memiliki jumlah penduduk banyak, memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah baik kandungan tanahnya maupun lautnya, sebagai negara kepulauan yang terletak diantara samudera Hindia dan Samudera Pasifik sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup diperhitungkan di dunia internasional. Selain itu juga Amerika Serikat sebagai negara Adidaya melihat potensi Indonesia sebagai pasar, dimana memiliki sumber daya manusia (SDM) terbesar setelah RRC dan India. Amerika Serikat memiliki posisi yang strategis di kawasan Asia Pasifik dan menjadi negara yang cukup berpengaruh di dunia.

Saat berbicara pada *US-Asia Business Summit* di Tokyo pada tanggal 1 Maret 2012, Duta besar Amerika serikat untuk Indonesia, Scot Marcial menyatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi dan populasi di Indonesia yang besar seperti menyajikan peluang ekonomi yang signifikan untuk bisinis Amerika Serikat, khususnya di sektor infrakstruktur dan kekuatan” Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kedutaan besar Amerika serikat di Indonesia dengan *AmCham* Indonesia untuk mengidentifikasi peluang yang akan memungkinkan perusahaan Amerika untuk menjadi kompetitif di Indonesia.[[3]](#footnote-3)

1. **Kerjasama PT Freeport Indonesia dan LPMAK**

Keberadaan MNC sebagai Nonstate actor yang actor yang kiprahnya melintasi batas kedaulatan negara dan beroperasi melalui foreign direct investment (FDI) dan berinteraksi di wilayah negara lain. MNC wilayah negara berkembang diperlakukan sama dan merata sebagaimana kapasitas sebuah negara, bahkan kadang-kadang negara penerima (host country) tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindak-tindak perusahaan raksasa tersebut. Untuk melindungi dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan,social budaya masyarakat, pemerintah meminta PT Freeport serius dalam program pengembangan masyarakat ini. PT Freeport Indonesia menaggapi hal tersebut dengan melakukan program yang disebut program dana kemitraan yang bekerja sama dengan yayasan dan lembaga pengembangan masyarakat adat yang biasa disebut LPMAK. Lembaga ini dibentuk bersama oleh perusahaan, lembaga adat, dan pemerintah untuk menyalurkan dan mengelola dan kemitraan atau biasanya disebut dana 1% dalam beberapa program utama seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penguatan lembaga adat,dan kegiatan keagamaan.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan dalam tulisan ini mengenai besaran alokasi dana kemitraan dan peruntukannya berdasarkan program di atas. Dalam implementasi di lapangan secara umum program pengembangan masyarakat ini sudah berjalan dengan baik dan dievaluasi dan diperbaharui setiap tahunnya.

Hubungan PT Freeport dan masyarakat amungme dan kamoro LPMAK dalam mengelola dana kemitraan PTFI berdiri sejak Tahun 1996, dana kemitraan tersebut di gunakan untuk pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan ekonomi, budaya dan agama. Dana tersebut dikelola oleh LPMAK melalui persetujuan dari badan pengurus dan badan Musyawarah yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah lokal, parah toko papua, pemimpin LPMAK, audit keuangan tahunan dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (**Laporan Tahunan Community Affairs 2013**). Peranan MNC’s dalam membangun masyarakat dalam kaitannya PT. Freeport dalam berkontribusi pada pembangunan masyarakat Amungme dan Kamoro dengan adanya globalisasi.

Program Dana Kemitraan yang disisihkan dari satu persen penghasilan kotor PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan terobosan untuk membangun komunitas di sekitar area kerja perusahaan. Dana Pembangunan Masyarakat ini merupakan dana hibah perusahaan bagi pembangunan suku lokal di Kabupaten Mimika, dan sudah dilakukan sebelum pemerintah menetapkan community development sebagai kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Sebagai pengelola Dana Kemitraan PT Freeport Indonesia, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) mempunyai peran strategis menjadi mediator antara PT Freeport Indonesia dan masyarakat suku asli di Kabupaten Mimika untuk menggagas arah dan program pembangunan masyarakat lokal di Mimika.

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) LPMAK telah merancang strategi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pemahaman semua pihak dalam konteks pengembangan masyarakat lokal di Mimika. Harapannya, semua pihak dan pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan itikad bersama mendukung program pembangunan sosial-ekonomi masyarakat yang dilakukan PT Freeport Indonesia.[[5]](#footnote-5)

**Yeremias Imbiri** mengatakan, LPMAK telah memiliki media internal seperti Tabloid LAndAS, situs [www.lpmak.org](http://www.lpmak.org/) serta menjalin kerjasama dengan Televisi Mandiri Papua dan Trans7. “Tetapi sosialisasi melalui media seperti ini belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan informasi masyarakat terkait hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan LPMAK melalui Dana Kemitraan PTFI.

Karena itu, Biro Humas merancang model strategi komunikasi langsung melalui tatap muka dan dialog dengan semua pemangku kepentingan. Model komunikasi ini diarahkan kepada masyarakat luas, institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, wakil adat Suku Amungme dan Kamoro, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan seluruh komponen masyarakat yang terlibat langsung pada program pembangunan masyarakat melalui Dana Kemitraan PT Freeport Indonesia. Model sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus menjalin kemitraan dalam rangka memperkuat pembangunan sosial masyarakat lokal di Mimika melalui Dana Kemitraan yang disalurkan PT Freeport Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Seperti yang kita ketahui, kepentingan nasional suatu negara bersumber dari budaya bangsanya yaitu hidup bangsa, pola pikir dan sikap yang terbentuk melalui proses pengalaman sejarah yang diwariskan dari bangsa itu sendiri. Karena politik luar negeri suatu negara merupakan kelanjutan atau perjuangan dari kepentingan nasionalnya.

Perkembangan kapitalisme global tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip ekonomi klasik yang sampai saat ini terus dipertahanakan bahkan pada dominan-dominan yang tidak terbayangkan akan mengalami proses-proses transformsi ideologi pasar tersebut. Kapitalisme sebagai system dunia yang bermula pada abad ke-16 ketika orang-orang Eropa berhamburan keluar dari sudut kecil dunia untuk berdagang menaklukan, dan merampas semakin menunjukan kejayaannya terutama sejak runtuhnya tembok berlin dan berakhirnya era perang dingin (Gelinas,2003:16). Kapitalisme global secara simbolik telah memulai masa dimana kemenangannya atas komunisme dan sosialis ditandai dengan berjayanya jargon demokrasi dan pasar bebas. Mesin ekonomi mulai diciptakan oleh kapitalisme melalui instrument-instrumennya mencari eksistensi kehidupan melalui ekspansi modal dan penimbuanan keuntungan *(profit*). Sehingga kuasa ekonomi makro (*kapitalsime*) mulai bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis pada permintaan dan penawaran. Hal yang sama masih berlangsung hingga detik ini ketika indikator perekonomian kontemporer juga mengamplifikasi jurus ampuh *supply* *demand* menyiasati kemajuan jaman.

Politik Luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik suatu negara yang berbeda dengan negara lain di dunia. Politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu negara dalam mengatur hubungan luar negeri.Tujuan dari politik luar negeri, yakni untuk mewujudkan kepentingan nasional dari negaranya serta memuat gambaran atas keadaan negara di masa datang dalam dunia internasional. Politik Luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara dikemukakan oleh J.Frankel:

**Politik Luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.[[7]](#footnote-7)**

Dalam politik luar negeri tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, melainkan juga aspek-aspek internal yang berupa kepentingan-kepentingan nasional dari suatu negara sehingga kompleks. Aktor utama dalam sistem hubungan internasional tetap dilakukan oleh negara, walaupun banyak aktor-aktor non-negara yang mulai turut berperan penting didalamnya.

Pada dasarnya politik luar negeri merupakan “*action theory”*, atau kebijakasanaan dari suatu negara yang ditujukan untuk negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Sehingga, secara umum dalam memahami politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya menjadi politik dan luar negeri. Politik (*Policy),* yaitu seperangakat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep pilihan, dimana untuk tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangakan, mengenai wilayah dan konsep wilayah akan membantu dalam upaya memahami konsep luar negeri *(foreign)*. Jadi, politik luar negeri *(foreign policy)* dapat diartikan sebagai seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Determinan kedua, yang berhubungan dengan politik luar negeri merupakan kemampuan nasional. Kemampuan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki suatu bangsa, baik yang secara actual maupun yang bersifat potensial. Salah satu aspek yang dapat dikategorikan dalam kemampuan nasional, yakni memiliki sumber daya alami yang melimpah, suatu negara dapat mengembangakn hubungan luar negerinya dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti, sosial-budaya, politik dan terutama dalam bidang ekonomi.

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negerinya masing-masing, tetapi tidak mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamikan internasional. Karena adanya interaksi terus-menerus anatar bangsa-bangsa di dunia. Dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuna-tujuan politik luar negeri suatu negara, yakni:

1. Nilai (*Values)* yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.[[8]](#footnote-8)

Kebijakan politik luar negeri suatu negara berupa suatu arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran yang merupakan strategi serta taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangakan politik luar negeri berupa pola perilaku yang di wujudkan oleh suatu negara sewaktu dalam proses memperjuankan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus.

Kebijakan Luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu:

1. Politik Luar negeri sebagai sekumpulan orientasi adalah pedoman bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut.
2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Sedangkan, kebijkan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangakan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri.
3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi.[[9]](#footnote-9)

Perlu diperhatikan dalam keterkaitan kepentingan nasional dan politik luar negeri adalah bahwa peaksanaan politik luar negeri tersebut semaksimal mungkin dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional,baik diukur dari penongkatan kemakmuran dan kesejahteraan nasional. **Sufri Yusuf** memberikan sebuah definisi standar bahwa politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.[[10]](#footnote-10) Karena Situasi dan kondisi dunia yang dinamis dan mengalami dinamika yang terus berkembang, maka kebijaksanaan politik suatu negara selalu mengalami penyususnan atau penyesuaian dengan kondisi politik luar negeri, karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Oleh sebab itu, kebijaksanaan politik luar negeri sangat di tentukan oleh kondisi obyektif politik dalam negeri. Apa yang di rumuskan pada politik dalam negeri, akan menjadi acuan untuk perumusan politik luar negeri yang ditujukan pada dunia internasioal.

PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988) di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.



**Gambar 2.1. Wilayah Pertambangan**

Wilayah kerja PT. Freeport IndonesiaFreeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.

Sejak tahun 1996 PTFI telah berkomitmen untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk kepentingan masyarakat setempat melalui Dana Kemitraan PTFI untuk Pengembangan Masyarakat. Dana Kemitraan ini dikelola dan disalurkan oleh sebuah organisasi yang bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). LPMAK dikelola oleh sebuah Badan Pengurus dan sebuah Badan Musyawarah yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah lokal, para tokoh Papua, pemimpin lokal masyarakat Amungme dan Kamoro, dan PT Freeport Indonesia sendiri. LPMAK mempublikasikan program pengembangan masyarakatnya melalui situs web ([www.lpmak](http://www.lpmak).)

Salah satu program nyata perusahaan PT. Freeport Indonesia adalah memberikan perhatian khusus bagi masyarakat setempat dimana para pekerja yang masih muda ataupun para pekerja yang memiliki anak sekolah diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan melalui suatu organisasi atau lembaga yang diberi nama Lembaga pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). LPMAK adalah lembaga yang berbadan hukum dan berwewenang untuk mengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) khususnya dalam pemberian biaya studi bagi masyarakat khususnya siswa dan Mahasiswa. Adapun tujuan dari lembaga pengembangan masyarakat (LPMAK) adalah menjadi lembaga independen professional dan mandiri dalam pengelolaan dana serta program, disamping itu tujuannya juga ingin mewujudkan masyarakat asli di Kabupaten Timika yang berperan sebagai penggerak pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai kualitas hidup yang layak, sejahtera lahir dan batin secara berkesinambungan. Secara faktual program kemitraan yang direalisasikan oleh LPMAK memang menunjukan banyak keberhasilan terutama peran lembaga tersebut bermitra dengan Perguruan Tinggi yang ada diluar daerah dengan sasaran untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang handal, agar kelak dengan peran tersebut para siswa dan Mahasiswa yang diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai jenjang pendidikan akan mampu membangun potensi daerah mereka sendiri.

1. **Berdirinya PT. Freeport Di Indonesia**

PT. Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang berasal dari Amerika serikat dan bergerak dalam bidang pertambangan.PT. Freeport Indonesia mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc (FXC). Perusahaan ini menjadi perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg di salah satu provinsi Indonesia, yakni Provinsi Papua.

PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di Timika Papua merupakan salah satu anak perusahaan dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.yang berkantor pusat di Phoenix, Arizona Amerika Serikat. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX) menjadi perusahaan transnasional (TNC) atau juga di sebut MNC yang beroperasi di empat benua yang menambang tembaga, emas dan molybdenum. Salah satunya tempat beroperasinya berada di Indonesia, yakni di pegunungan Khatulistiwa di Papua. Selain beroperasi di Indonesia, FXC juga beroperasi di Gunung Api Megah Peru di Chili, gurun-gurun di Barat Daya Amerika Serikat dan yang terbaru di Republik Demokrasi Kongo. Sehingga PT. Freeport Indonesia McMoRan Copper & Gold Inc (FXC) menjadi pemasok tembaga, logam, molybdenum, produk-produk kimia dan pelumas yang terbesar di dunia serta menjadi produsen besar emas.

Dalam buku Hubungan Internasional “Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia”. Trie Edi Mulyani menjelaskan catatan sejarah dari papua atau biasanya juga di sebut dengan Irian Jaya. Pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda yang saat ini masih berada di Irian Barat menyerahkan kepada PBB, yakni UNTEA hingga mulai pada tanggal 1 Mei 1963 bendera Belanda diturunkan dan digantikan bendera PBB dan dan bendera Indonesia. Dalam proses penyerahan Irian Barat (Papua) ke Indonesia. PBB merancang sebuah kesepakatan yang dikenal dengan *“New York Agreement”* yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat SEKARANG Papua untuk memilih setelah dua puluh lima tahun menjadi bagian dari NKRI akan tetap bergabung atau ingin berdiri sendiri dengan melalui pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan pada sejarah masuknya papua menjadi salah satu provinsi Indonesia, banyak pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Papua ke Indonesia merupakan hal yang benar. Hal ini berdasarkan pada sejarah yang termasuk wilayah Indonesia merupakan daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Pada akhirnya hasil Pepera 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten masa itu di Irian Barat setuju untuk tetap bersatu dengan pemerintah Indonesia.[[12]](#footnote-12)

Dalam proses penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia semuanya tidak lepas dari campur tangannya Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Jhon F.Kennedy. Dimana Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang mendukung penuh penyatuan Papua dalam NKRI. Setiap negara dalam berinterkasi dengan negara lain semuanya tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional yang dibawah oleh negara masing-masing. Seperti yang di kemukakan S.L Roy dalam bukunya “Diplomasi” bahwa, politk luar negeri merupakan pengejahwantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.[[13]](#footnote-13) Hal ini dapat di maknai sebagai semua yang menjadi kebijakan suatu negara dalam melakukan interaksi dengan negara lain adalah untuk mewujudkan kepntingan nasionalnya dapat terwujud, penguasa negara dapat menempuh jalur apapun untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan meminimalkan kerugian dalam kerjasama bilateral maupun multiraterlal.

Riwayat proyek Freeport di Indonesia telah ada sejak tahun 1936, dimana Colijin dan Jean-Jacques Dozy melakukan ekspedisi dan menjadi kelompok luar pertama yang mencapai Gunung Glester Jayawijaya sehingga menemukan Errtsberg. Pada tahun 1960, ekspedisi Freeport yang dipimpin oleh Forbes Wilson dan Del Flint menjelajahi Ertsberg. Pada tahun 1963 sejak terima Irian barat yang sekarang berubah nama menjadi Papua ke Indonesia, sebenarnya sudah rencana proyek tambang dari PT. Freeport Indonesia, tetapi ditangguhkan akibat kebijaksanaan rezim Soekarno tahun 1966, sehinga sejak itulah aturan mengenai investasi asing di Indonesia dibuat dan membuka diri bagi investasi asing.[[14]](#footnote-14)

Sejak tanggal 5 april 1967 Freeport telah melakukan perjanjian Kontrak Karya (KK) untuk 30 tahun dengan pemerintah Indonesia, sehingga Freeport menjadi Perusahaan satu-satunya yang menangani kawasan Ertseberg seluas 10 kilometer persegi. Kontrak Karya I seharusnya berakhir pada tahun 1967 selama 30 tahun lagi sehingga akan berkahir tahun 2021 dan kesepakatan kerja tersebut masih dapat diperpanjang dua kali masing-masing dalam waktu sepuluh tahun. Karakterisrtik kontrak karya di dalamnya seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang (MNC).Negara tidak memiliki control terhadap kegiatan operasional perusahaan dan hanya memperoleh royalty yang besarnya telah ditentukan dalam kontrak karya tersebut. Jadi, Indonesia berdasarkan Kontrak Karya hanya menerima satu persen dari hasil tambang dan PT.Freeport Indonesia menerima keuntungan yang jauh sangat besar, sehingga negara dan rakyat Indonesia sangat di rugikan. Hal inilah yang menyebabkan sekarang banyak permasalahan yang bermunculan. Yang memimpin Freeport adalah Chairman Of The Board FCX James R.Moffet dan *Chief Executive Officer (CEO)* FCX Richard C. Adkerson.

Proses masuknya PT. Freeport Indonesia tidak dapat dipungkiri tidak terlepas dari dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia dalam proses integasi Irian Barat (Papua) ke NKRI, karena setahun dari masuknya Papua ke NKRI, karena setahun dari masuknya Papua ke NKRI kemudian disusul oleh penandatangan Kontrak Karya Pertama (KK I) antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan Freeport. Dalam proses integrasi Papua ke NKRI sebenarnya banyak masalah yang telah ada,sehingga dengan masuknya Freeport makin memperbanyak aktor yang terlibat didalamnya sehingga semakin banyak masalah yang ditimbulkan. Sumber-sumber konflik yang berada di Papua dapat di kelompokan dalam empat isu. Yang pertama, masalah merjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli papua akibat pembangunan ekonomi yang tidak dapat merata antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian Timur, konflik politik dan migrasi massal ke Papua sejak 1970.

Kedua kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan yang masih belum terjangkau sampai ke pelosok desa, kesehatan, terutama kesehatan bagi penduduk asli papua yang harus dipindahkan demi beroperasinya PT Freeport Indonesia yang telah bekerjasama dengan pemerintah pusat. Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan kontruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Dan isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Provinsi Papua.

Menurut hasil penelitian tim kajian Papua LIPI tahun 2004, secara garis besar terdapat tiga aktor utama yang terlibat dalam konflik papua dan berada di level lokal, nasional dan internasinal, yakni negara/pemerintah *(state),* masyarakat (*Society*), dan pembisnis (*Market*). Peran dan kepentingan dari aktor-aktor tersebut dapat di petakkan, namun tidak mudah dalam pemetaan pola dari hubungan di antara para aktor tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan setiap aktor memiliki lebih dari satu kepentingan yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Kebijakan-kebijkan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada Era Orde Baru mengenai penanaman modal asing adalah UU No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan UU No.11 Tahun 1967 Mengenai Pertambangan.[[15]](#footnote-15) Kedua undang-undang inilah yang menjadi awal penanaman modal asing dan terbuka bagi luar.Jika pada jaman soekarno yang sangat nasionalis sehingga aturan kontrak yang dibuat juga akan selalu menguntungkan.Sehingga, masuknya Freeport ke Indonesia tidak terlepas dari bantuan dari Amerika Serikat yang merupakan negara asalnya.

Adapun komitmen PT.Freeport Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan yang diperhatikan.Karena PT.Freeport Indonesia menyadari pentingnya hasil tambang seperti logam bagi perekonomian dunia. Dalam pemenuhan kebutuhan, maka harus diimbangi dengan kewajiban social dan lingkungan sehingga dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan tidak membahayakan generasi mendatang. Hal inilah yang menjadi doktrin pokok dari pembangunan berkelanjutan yang juga mendasari komitmen pihak PT.Freeport McMoran Copper & Gold Inc dan PT Freeport Indonesia. PTFI selaku anak perusahaan dari Freeport McMoran Coppper & Gol Inc. Juga menganut dan mentaati kebijakan-kebijakan organisasi induk yang menyangkut etika, social dan lingkungan. Kebijakan inilah yang memandu PT Freeport Indonesia dalam menempuh jalan menuju pemabngunan berkelanjutan. PT Freeport Indonesia juga harus bertanggung jawab atas amanah ataupun aturan pemerintah indonesia, serta terhadap Provinsi Papua, Kabupaten Mimika serta masyarakat asli Amungme dan Kamoro serta ke-5 suku yang berada disekitar tempat beroperasinya proses tambang. Sedangkan tanggung jawab pembayaran yang harus di bayar oleh PT Freeport Indonesia, yaitu berupa pajak, royalti, dividen dan berbagi iuran kepada Pemerintah Indonesia. Berdasarkan laporan PT.Freeport Indonesia, pada tahun 2008 saja pembayarannya mencapai 1,2 miliar dolar AS. Serta menurut laporan PT.Freeport Indonesia juga, PT.Freeport Indonesia merupakan penyedia pekerja swasta terbesar di Papua, memberikan pajak terbesar bagi pemerintah Indonesia.

Prinsip-Prinsip bisnis dari Frepoort McMoran Copper & Gold Inc dan PT.Freeport Indonesia juga terikat oleh prinsip-prinsip tersebut. Prinsip perilaku bisnis mewajibkan setiap karyawan untuk memenuhi standar etika bisnis mewajibkan setiap karyawan untuk memenuhi standar etika yang telah ditetapkan baik yang ditetapkan oleh perusahaan oleh perusahaan maupun undang-undang anti korupsi dan Undang-Undang Amerika Serikat Sarbanes-Oxley. Setiap karyawan diwajibkan untuk melaporkan setiap dugaan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip tersebut kepada pejabat kepatuhan dari perusahaan. Setiap kejadian aau permaslaahan yang dilaporkan yang menyangkut pelanggaran atau potensi pelanggran diselidiki dan ditanggulangi sebagaimana mestinya.[[16]](#footnote-16)

Diketahui bahwa sudah 37 ribu lebih sajam milik MNC untuk mata rantai ekonomi dalam negeri dan dunia internasional. Dimana perusahaan negara di dunia merupakan pendukung investasi operasi tambang bagi PT.Freeport Indonesia dan 150 ribu anak perusahaan di dunia yang punya hubungan produksi di bawah paying eksplorasi tambang milik PT.Freeport Indonesia yang berpusat di Amerika Serikat dan skala operasi terbesar PT.Freeport Indonesia di dunia, yakni yang berada di Papua “Tembaga Pura “ Indonesia dengan memiliki cadangan emas, batubara,[[17]](#footnote-17) dan merkuri.

Laporan tentang pembayaran Freeport McMorran Coppper & Gold Inc.Pada tahun 2010 (dapat dilihat di Lampiran 1). Dimana berdasarkan table tersebut,dapat dilihat bahwa indonesia lebih banyak menerima bayaran dari PT.Freeport Indonesia yaitu totalnya dari pajak penghasilan sampai pada pajak property dan biaya pajak lainnya mencapai $1,974 juta atau hampir sekitar dua milyar rupiah.Bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang tidak mencapai seperdua dari Indonesia.Sehingga, menjadikan PT.Freeport Indonesia sebagai penyumbang devisa negara yang sangat besar menjadi salah satu objek vital nasional. Apabila PT.Freeport Indonesia mengalami penurunan karena berbagai hambatan,maka akan memengaruhi pemasukan terhadap Pemerintah Indonesia serta perekonomian masyrakat papua dimana sebagain besar pekerja/buruh PT.Freeport Indonesia merupakan masyrakat asli papua dan juga berdampak terhadap pendapatan *home country*,yakni Amerika Serikat.

1. **Bentuk-Bentuk Kerjasama PT Freeport dan LPMAK**

LPMAK adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkedudukan di Kabupaten Mimika, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat suku Amungme dan Kamoro, serta 5 kekerabatan suku lainnya (Moni, Dani, Mee/Ekari, Nduga dan Damal) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika. Program-program LPMAK berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam bidang  pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan sektor lain yang sesuai.  Dalam mencapai tujuan tersebut, kerjasama melalui kemitraan dengan pemerintah, lembaga adat, lembaga agama, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan lembaga lain menjadi bagian yang penting. Sumber utama pendanaan program kerja LPMAK saat ini adalah Dana Kemitraan PTFI yang juga dikenal dengan nama Dana 1 %.

Saat ini LPMAK sudah menjadi lembaga lokal yang diperhitungkan, dibutuhkan masyarakat, dan mempengaruhi kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.  Banyak prestasi yang diukir oleh LPMAK dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  Program pendidikan dan kesehatan LPMAK merupakan program andalan dengan hasil-hasil nyata, terukur dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.  Program ekonomi LPMAK telah berhasil mengembangkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam jumlah yang nyata.  Beberapa KSM telah berhasil dan menunjukkan tanda-tanda kemandirian dalam pengelolaannya dan keberlangsungan usaha mereka.

Di masa yang akan datang tantangan yang akan dihadapi oleh LPMAK makin berat dan komplek. Tuntutan kepentingan dan harapan Para Pemangku Kepentingan (PPK) atau *stakeholders* yang tinggi dan beragam kepada LPMAK merupakan semacam mandat yang perlu dipenuhi.  Disamping itu, secara internal LPMAK menghadapi persoalan-persoalan seperti: kemampuan organisasi belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan program yang makin meluas, kekurangan kepemimpinan, kemandirian dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan terkait untuk kepentingan lembaga, integritas seluruh karyawan dan badan-badan di LPMAK, dan keberlanjutan sumber pendanaan.LPMAK dapat menyusun rencana strategi yang tepat dan mampu mengimplementasikannya dengan baik dalam merespon tuntutan dan persoalan yang timbul agar perannya dalam memberdayakan masyarakat Suku Amungme, Suku Kamoro dan lima kekerabatan suku lainnya serta sekaligus mampu menjaga keutuhan NKRI dapat berjalan dengan sukses.[[18]](#footnote-18)

Dampak dari Operational Multinational Corporations Terhadap masyarakat lokal yang mengambil objek penelitian pada PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika,Pandangan Secara akademis tentang implementasi dari program masyarakat ( Community Development) dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR). CSR PT Freeport Indonesia adalah program yang lasim digunakan sebagaimana perusahaan pada umumnya dalam menunjukan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak atas eksploitas pertambangan yang dilakukan.[[19]](#footnote-19)Kasus ini dikaji dengan perspektif Hubungan Internasional karena keberadaan MNC sebagai Non State Actor yang kiprahnya melintasi batas kedaulatan negara lain. MNC di wilayah negara berkembang diperlakukan sama dan merata sebagaimana kapasitas sebuah negara,bahkan kadang-kadang negara penerima (host country) tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perusahaan raksasa tersebut.Untuk Melindungi Masyarakat dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan social budaya masyarakat,pemerintah meminta PT Freeport Indonesia menanggapi hal tersebut dengan melakukan program-program yang disebut dengan dana kemitraan yang bekerja sama dengan yayasan dan lembaga pengembangan adat masyarakat yang disebut LPMAK.Lembaga ini di bentuk bersama-sama dengan perusahaan, Lembaga Adat, dan pemerintah yang menyalurkan dan mengelola dana kemitraan atau biasanya di sebut dana 1% dalam beberapa program utama seperti Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan ekonomi, penguatan lembaga adat, dan kegiatan keagamaan.

1. **Nilai-Nilai PT Freeport dalam Membangun Sumber Daya Manusia**

Dengan Moto dalam kinerja PT Freeport yaitu Menjalin Kerjasama Memastikan Pembangunan berkelanjutan (Good Corporate Citizen) PT Freeport memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Amungme dan Kamoro Serta kelima kekerabatan suku lainnya PT Freeport selalu memperhatikan kondisi Pekerjanya maupun kondisi keadaan mayarakat pemilik hak ulayat,sebagai warga masyarakat PT Freeport selalu berusaha menciptakan dan mendukung program peningkatan ketrampilan kepada masyarakat setempat serta menciptakan dampak positif yang permanen setelah kegiatan pertambangan tidak ada diwilayah pertambangan itu nantinya. PT Freeport selalu menerapka **Etika,Profesional dalam Bekerja.** PT Freeport merasa dengan amanah yang di berikan oleh Pemerintah Indonesia kepada PT Freeport selaku pengelola pertambangan di provinsi papua dimana PT Freeport melakukan pengelolaaan cadangan Tembaga dan emas terbesar didunia, dengan wawasan perancangan dan pegelolaan membentang berpuluh-puluh tahun kedepan.Begitu besarnya kegiatan proyek dan program tersebut memberikan PT Freeport untuk bermitra dengan Pemerintah Indonesia,Provinsi Papua,dan Kabupaten Mimika,dan masyarakat di sekitar wilyah adat untuk pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak,PT Freeport juga menjalin hubungan yang aktif serta senantiasa berdialog bersama para pemangku kepentingan guna menjamin keberhasilan bersama.

Sejak 1992, saat dimulainya kontrak PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia pada manfaat langsung bagi masyrakat Indoensia telah mencapai nilai lebih dari USD 8 milliar. PT FI merupakan penyedia lapangan kerja swasta terbesar di papua dan sebagai salah satu wajib pajak di Indonesia.Selain itu PT FI juga memberikan bantuan bagi pengembangan masyarakat sebagai pengakuan atas hak ulayat masyarakat setempat,program pengelolaan lingkungan,serta berbagai kegiatan bagi masyarakat Papua dan Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan anak perusahaan dari Freeport –Mccmoran yang bergerak di bidang pertambangan di Indonesia.Selaku penghasil tembaga dan emas di dunia, PT FI menyadari pentingnya logam bagi ekonomi dunia saat ini, pemenuhan kebutuhan atas barang tersebut harus di imbangi dengan kewajiban social dan lingkungan sehingga dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini hendaknya tidak membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pendekatan yang di tempuh PT Freeport Indonesia adalah sebagai berikut Mengelola berbagai tantangan,mengoptimalkan peluang Selaku anggota pendiri dari International Council on Mining and Metals (ICMM/Dewan Internasional tentang Pertambangan dan Logam), Freeport-McMoRan menganut Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan dari ICMM, dan komitmen ini melandasi upaya kami untuk mengenal dan mengelola berbagai tantangan dan peluang di seluruh operasi kami. Kerangka kerja tersebut ([*www.icmm.com*](http://www.icmm.com/)) terdiri dari tiga unsur yang wajib dipenuhi oleh anggota korporasi:

1. Melaksanakan 10 Asas Pembangunan Berkelanjutan ICMM di seluruh kegiatan usaha,
2. Membuat laporan sesuai dengan kerangka Global Reporting Initiative (GRI/Prakarsa Pelaporan Global) yaitu pedoman Pelaporan Standar Generasi K etiga (G3 Standard Disclosure) serta Mining and Metals Sector Supplement (MMSS), dan
3. Memberi jaminan (assurance) secara independen terhadap pelaksanaan komitmen.[[20]](#footnote-20)

Pada tahun 2009, kami mengembangkan dan melaksanakan pendekatan berbasis risiko terhadap seluruh Portofolio kegiatan kami dalam rangka lebih menegaskan, mengelola, dan memantau tantangan serta peluang pembangunan berkelanjutan yang terpenting bagi pemangku kepentingan maupun usaha kami. Kami pun akan memenuhi komitmen jaminan dengan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan keberlanjutan dengan 10 Asas Pembangunan Berkelanjutan ICMM maupun persyaratan wajib yang tertuang di dalam pernyataan posisi ICMM;
2. Risiko dan peluang penting pembangunan berkelanjutan yang kami hadapi berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha, maupun informasi dari pemangku kepentingan;
3. Keberadaan dan status berbagai sistem dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko dan peluang penting pembangunan berkelanjutan tersebut;
4. Kinerja kami terkait risiko dan peluang pembangunan berkelanjutan yang telah diidentifikasi; dan Pengungkapan wajib dalam level aplikasi A+ pada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI G3.

Selain itu Freeport Indonesia berkomitmen mengalokasikan dana sebesar 1 persen dari pendapatan kotor perusahaan bagi pengembangan wilayah suku-suku yang digunakan dalam pengoperasian khususnya suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik ulayat. Pada tahun 2011 dana sebesar 54,4 juta dolar AS telah dialokasikan lewat program Dana Kemitraan Freeport untuk Pengembangan Masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). LPMAK dalam pengelolaannya bermitra dengan Pemerintah Daerah, ornop, dan mitra-mitra masyarakat untuk mendukung pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam komunitas-komunitas lokal.

1. **Hak-Hak Suku Asli**

Freeport Indonesia telah menerima keluhan dari masyarakat setempat tentang hak ulayat tanah yang terdampak dari operasi Freeport Indonesia. Sesuai dengan hukum tentang hak ulayat yang ada di Indonesia, Freeport Indonesia tidak memiliki wewenang dalam penentuan batas hak ulayat antar kelompok suku di sekitar wilayah operasi Freeport Indonesia. Namun demikian, Freeport Indonesia tetap bekerja dengan pemerintah daerah untuk menindak lanjuti tuntutan tersebut dan mencari solusi sesuai denga hukum yang berlaku di Indonesia. Freeport Indonesia memberikan kompensasi hak ulayat kepada masyarakat asli daerah-daerah yang terdampak melalui berbagaiprogram pengembangan masyarakat lokal, termasuk pemberian Dana Perwalian kepada suku Amungme dan Kamoro selama tambang beroperasi. Sejak tahun 2001, Freeport Indonesia telah berkontribusi lebih dari 29 juta dolar AS untuk Dana Perwalian ini. Selain itu, Freeport Indonesia telah melaksanakan program rekognisi di desa-desa Amungme dan Kamoro yang terdampak melalui pembangunan infrastruktur dan program pengembangan masyarakat lainnya. Pada tahun 2011, Freeport Indonesia menerima 6 tuntutan hak ulayat dan kompensasinya dari berbagai kelompok masyarakat asli. Untuk mengatasi masalah ini, Freeport Indonesia juga telah menyetujui bekerjasama dengan lembaga-lembaga adat untuk melakukan pemetaan wilayah adat, sekaligus sebagai antisipasi munculnya tuntutan hak ulayat di masa mendatang.[[21]](#footnote-21)

Sesuai UUD Republik Indonesia, semua lahan tak diolah adalah milik Pemerintah Indonesia dan semua kekayaan mineralnya menjadi milik Pemerintah Indonesia. “Kesepakatan Januari” 1974 antara Freeport Indonesia dengan Suku Amungme merupakan bentuk pengakuan pertama di Indonesia terhadap hak ulayat masyarakat atas tanah perburuan dan pengumpulan sumber daya alam tradisional mereka. Mengikuti perjanjian itu, Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui hak atas pemakaian tanah ulayat. Pengakuan penggunaan tanah ulayat dalam bentuk ‘rekognisi’ ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang melepaskan hak ulayat mereka. Sebagai hak properti yang bersifat komunal Freeport Indonesia telah memberi rekognisi dalam beberapa tahun ini melalui program-program yang disepakati bersama-sama masyarakat Papua setempat dan Pemerintah Indonesia.Dua program rekognisi jangka panjang telah berjalan di daerah dataran tinggi dan dataran rendah di wilayah kerja kami. Kedua program ini menyediakan prasarana, proyek pembangunan sosial ekonomi, termasuk perumahan, gedung sekolah, asrama siswa, klinik kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan umum, gedung perkantoran, jalan raya, jembatan, tangki air bersih, kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, sarana olah raga, serta studi kelayakan tentang kesempatan usaha.

Program Rekognisi bagi Suku Kamoro memberikan kompensasi untuk pelepasan lahan kepada Pemerintah Indonesia oleh lima desa Kamoro di daerah dataran rendah, termasuk lahan yang digunakan untuk pengendapan Sirsat, sarana dok kargo, pelabuhan, dan jalur transmisi listrik. Program ini awalnya fokus pada prasarana fisik, termasuk perumahan dan sarana lingkungan. Akan tetapi, sasaran pembangunan saat ini dipusatkan pada pengembangan ekonomi dan sumber pendapatan, pendidikan kesehatan dan akses pada sarana kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan menengah dan tinggi, pembangunan kampung dan lembaga sosial, dan pelestarian budaya Kamoro. Termasuk juga adalah program-program untuk mengembangkan kebun sagu dan kelapa, serta membina komersialisasi industri perikanan setempat. Untuk informasi lebih lanjut mengenaiprogram ini dapat merujuk kepada bagian“ pengembangan ekonomi berbasis desa” pada laporan ini.

Program Pengembangan Tiga Desa merupakan program yang serupa untuk tiga desa Amungme di dataran tinggi. Program ini memberikan tambahan rekognisi bagi anggota Suku Amungme yang hidup paling dekat dengan tambang dan telah menerima bantuan berdasarkan perjanjian pada1974, sejalan dengan perluasan dan keberhasilan lingkup kegiatan kami. Program ini mencakup pembangunan jembatan, jalan raya, tanggul pelindung, perumahan, layanan air dan saluran air limbah, serta pengembangan sebuah sistem pembangkit listrik tenaga air.[[22]](#footnote-22)

Kamoro, mereka juga mencari moluska dan udang untuk dijadikan pelengkap dari sagu tentunya juga sambil mencari kayu bakar untuk memasaknya.Hal ini dikarenakan kegiatan memasak mereka masih dilakukan dengan cara tradisional. Bahkan gastropoda yang dikumpulkan dalam jumlah besar juga bisa mereka jadikan sebagai makanan untuk disantap. Beragam binatang yang memiliki kulit keras atau disebut dengan krustae mudah untuk ditangkap. Akan tetapi yang paling sering dijadikan sebagai bahan makanan adalah kepiting bakau. Bukan hanya disantap sendiri tapi juga dijual ke masyarakat yang lainnya. Memang penduduk asli dari suku ini bukan berprofesi sebagai petani. Padahal sejak ratusan tahun lalu mereka telah dikenalkan dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Tumbuhan hanya sebagian kecil dari berbagai bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka.Lalu bila dilihat dari segi budaya, tanah Papua ini menyimpan banyak budaya. Walaupun memang yang lebih dikenal adalah Suku Asmat namun di balik itu ada.

1. Ratama Arifin W “ Definisi Manajemen sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli” TEORI MODEL MANAJEMEN DALAM KETERKAITANNYA DENGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA”, [https://fhinzzcoepoe.wordpress.com/2010/10/02/definisi-manajemen-sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/,di](https://fhinzzcoepoe.wordpress.com/2010/10/02/definisi-manajemen-sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/%2Cdi) akses pada 17 Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Arief Budiman “*Teori Pembangunan Duni Ketiga”2000.hal 50.* [↑](#footnote-ref-2)
3. U.S Ambassador to Indonesia Scot Marcial Touts Substantial.

<http://jakarta.usembassy.gov/news/embnews_03052012.html>. Diakses pada tanggal 21 April 2016,Pukul 21.42 wib. [↑](#footnote-ref-3)
4. Chris Rumansi “Dampak Operasional Multinational Corporation (MNC) terhadap masyarakat lokal: Studi kasus PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua Periode 2001-2005”,Tesis Magister Ilmu social tidak di terbitkan,Program Pascasarjana Universitas Indonesia,2005 hlm.42 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sumber www. LPMAK.org (di akses pada 5 Mei 2016) [↑](#footnote-ref-5)
6. Admin,”LPMAK dalam Masyarakat Amungme Kamoro,Volume 2 Number 1 Tahun 2010 dalam <http://www.artikelFeeport.com>= di akses pada 21 Mey 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nomination Hearing To Be Secretary of State.http//www.state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.html.Diakses pada tanggal 17 Juni 2016.Pukul 21.52 Wita. [↑](#footnote-ref-7)
8. Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani.Op.Cit.Hal 51-52. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid.Hal 53-54. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri,Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Pelaksanaanya,* Pustaka Sinar,Jakarta,1989,hal 110. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. S.L.Roy.(1991).*Diplomasi.*Jakarta:Rajawali Pers.Hal.31. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid [↑](#footnote-ref-14)
15. Aminuddin Ilmar. (2005).*Hukum Penanaman Modal Asing.* Jakarta: Kencana.Hal 32 . [↑](#footnote-ref-15)
16. Tata Kelola Koporasi.http//www.ptfi.com/about/tatakelola.asp.diakses pada tangga 6 juni 2016.pukul 16.24 Wita. [↑](#footnote-ref-16)
17. Freeport Akar Separatis Negara.http//etnohistori.org/Freeport-akarseparatisme-negara.html.Diakses pada tanggal 3 mei 2016 pukul 20.01 Wita. [↑](#footnote-ref-17)
18. Renztra LPMAK Tabloid Jubi 2015 .Hal 2 [↑](#footnote-ref-18)
19. Cris Rumansi.2005.Dampak Operational Multinational Coorporation (MNC) Terhadap Masyarakat Lokal:studi kasus PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika-Papua 2001-2005. Jakatra Program Pascasarjana Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=108522&lokasi=lokal> . [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
21. PT Freeport Indonesia.2011.Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan Tahun hal.40 2011:*Menghubungkan Dunia.*Jakarta Office Building I [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)